

LKIP

2025

**KECAMATAN MANONJAYA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera** LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Manonjaya Tahun 2025. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

LKIP Tahun 2025 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah melebihi harapan. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan. Kondisi ini tercapai berkat dorongan continuous improvement di berbagai sektor, kolaborasi dan inovasi, serta komitmen pimpinan.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih. Waalaikumsaam wr. wb.

Tasikmalaya, Januari 2026

Camat Manonjaya,



IRMA KRISNAWAN, S.Sos, M.Si.

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I. LATAR BELAKANG	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN	2
III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
IV. ISU STRATEGIS	9
V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
I. TUJUAN DAN SASARAN	11
II. PERJANJIAN KINERJA	12
III. RENCANA KINERJA KECAMATAN MANONJAYA TAHUN 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. CAPAIAN KINERJA	15
II. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Bupati di Wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, yang merupakan bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat pada Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan

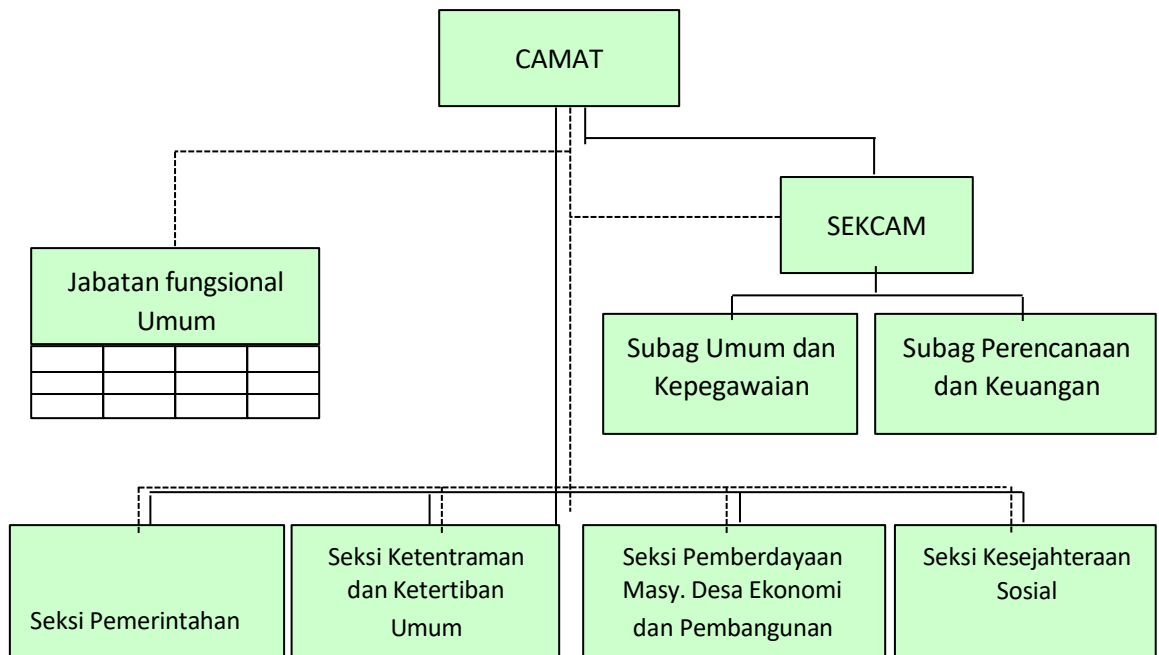
LKIP Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

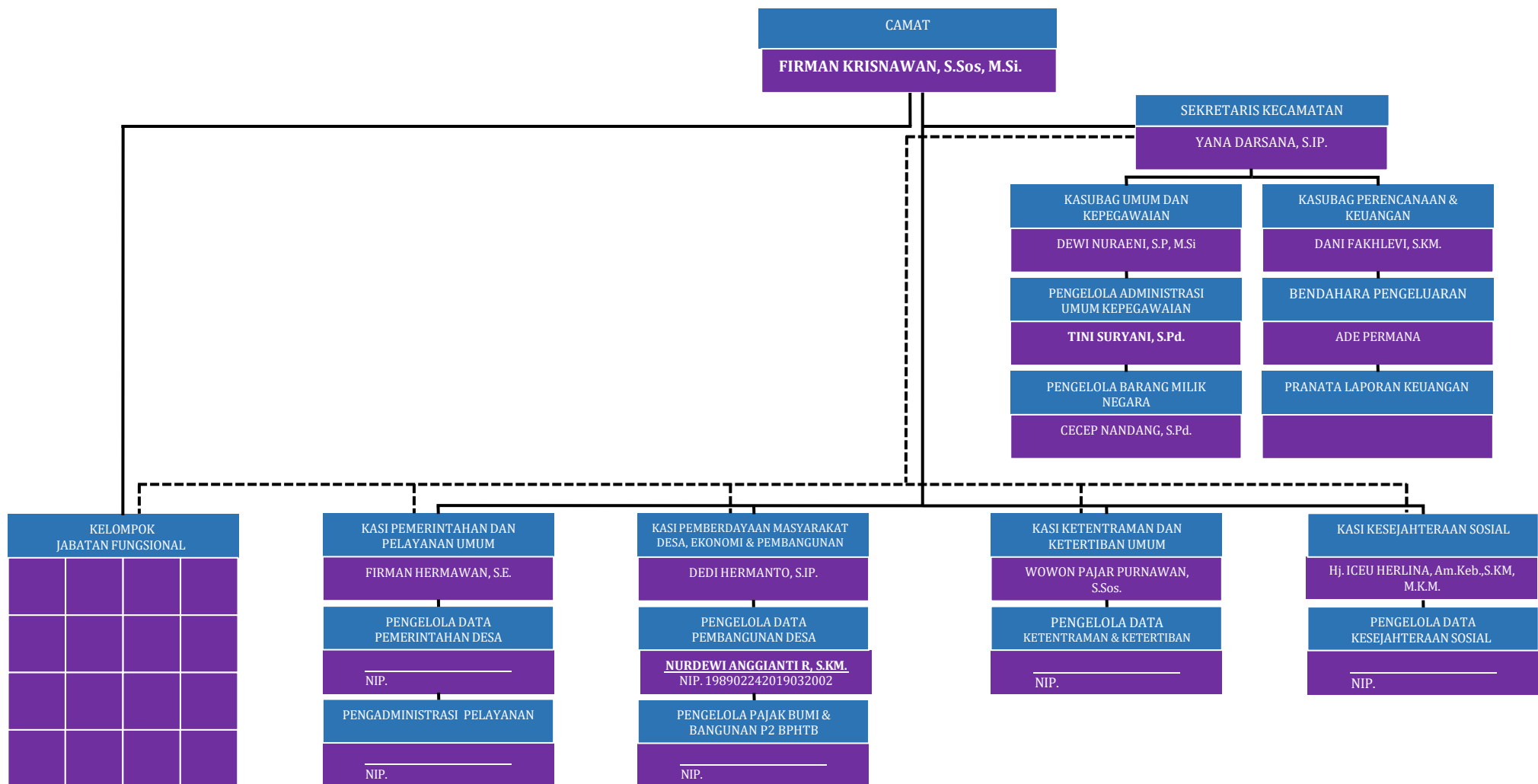
III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenali struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1
Struktur Organisasi





Aspek Kepegawaian

Aspek Kepegawian pada Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi Dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab terhadap Camat. Seksi masing-masing dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab terhadap Camat. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Manonjaya sebanyak 12 (duabelas) Orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Komposisi Pegawai Kecamatan Manonjaya
Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	-	2
5.	Seksi Pemerintahan	1	-	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan	1	1	2
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
8.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
JUMLAH		8	4	12

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Manonjaya yang berjumlah 12 orang, semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian

pada organisasi Kecamatan Manonjaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Struktur Kepegawaian Kecamatan Manonjaya berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.b	2
5	Pelaksana	4
JUMLAH		12

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Manonjaya yang berjumlah 12 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Personil Kecamatan Manonjaya berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S-2)	2
2.	Sarjana (S-1/D IV)	9
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	D2	-
5.	D1	-
6.	SLTA / Sederajat	1
7.	SLTP / Sederajat	-
8.	SD / Sederajat	-
JUMLAH		12

Dengan dukungan 12 orang personil yang ada pada Kecamatan Manonjaya dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 2 Orang, Sarjana 9 orang, SLTA sebanyak 1 orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Personil Kecamatan Manonjaya
berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Camat	1				1
2.	Sekretaris Kecamatan		1			1
3.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum		1			1
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi		1			1
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		1			1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1				1
7.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		4			4
8.	Su Bagian Perencanaan dan Keuangan		2			2
9.	Pelaksana					
Jumlah		2	10			12

Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

Geografis / Administrasi

Kecamatan Manonjaya Manonjaya terletak di sebelah timur Tasikmalaya berjarak kurang lebih 12 km. Keadaan alam Manonjaya datar dan berbukit dengan ketinggian rata-rata 292–297 m. Koordinat Kecamatan Manonjaya adalah 7,20 LS serta 108,15 BT. Terdiri dari Tanah Darat 3.215.21 Ha dan Tanah Sawah 999.79 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis (Kecamatan Ciamis)
 Sebelah Selatan : Kecamatan Gunungtanjung
 Sebelah Barat : Kota Tasikmalaya (Kec. Purbaratu dan Kec. Cibeureum)
 Sebelah Timur : Kecamatan Cineam

Kecamatan Manonjaya terdiri dari 12 Desa, 56 Dusun, 70 RW dan 329 RT dengan kondisi geografis yang berbukit bukit dan merupakan daerah yang sering terjadi

bencana alam tanah longsor karena sifat tanahnya yang labil. Adapun desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Manonjaya adalah : Batusumur, Cibeber, Cihaur, Cilangkap, Gunajaya, Kalimanggis, Kamulyan, Manonjaya, Margahayu, Margaluyu, Pasirbatang dan Pasirpanjang.

Selanjutnya berikut Data Kecamatan Manonjaya berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun, RT dan RW :

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DUSUN, RT DAN RW
DI KECAMATAN MANONJAYA**

NO	DESA	Luas Wilayah (Ha/KM) ²	PENDUDUK			JUMLAH		
			LK	PR	JML	Du- sun	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Batusumur	794,6	2.121	2.052	4.173	4	4	28
2.	Cibeber	291,7	2.188	2.046	4.234	3	6	28
3.	Cihaur	4,48	1.937	1.930	3.867	7	7	33
4.	Cilangkap	5,87	3.063	3.024	6.087	6	12	39
5.	Gunajaya	236	1.890	1.846	3.736	3	8	20
6.	Kalimanggis	390	3.430	3.371	6.801	6	9	38
7.	Kamulyan	1.725	2.534	2.464	4.998	3	9	31
8.	Manonjaya	0,92	2.322	2.376	4.703	4	5	34
9.	Margahayu	244	2.109	2.058	4.167	4	6	23
10.	Margaluyu	219	3.109	3.141	6.250	3	7	47
11.	Pasirbatang	5,605	3.249	3.164	6.413	4	8	36
12.	Pasirpanjang	341	2.892	2.807	5.699	4	8	36
JUMLAH			30.844	30.279	61.128	51	89	393

Sumber : Data s/d bulan Desember 2024

IV. ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Isu aktual yang terjadi pada Kantor Kecamatan Manonjaya yang merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Manonjaya yang timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

➤ Isu-isu Internal antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan;
- b. Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Bangunan dan mebeler banyak yang sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang, jaringan internet yang kurang);
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi;
- d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- e. Kurangnya akurasi data dari setiap unit kerja;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaantugas dan pelayanan.

➤ Isu-isu External antara lain :

- a. Berpariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
- c. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representatif.

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun kerja yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Juga pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah tercapai yang berhubungan dengan capaian dari program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatnya kinerja.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

I. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 merupakan rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian yang harus dicapai dalam masa jabatan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian ditetapkanlah tujuan dan sasaran Kecamatan Manonjaya adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KECAMATAN MANONJAYA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan kualitas pelayanan public di Kecamatan	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Manonjaya	C	C	B	B	BB	BB
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec Manonjaya	80.00	80.15	80.25	80.35	80.40	80.45
				Nilai Maturitas SPIP kec. Manonjaya	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
				Hasil LPPD Kec. Manonjaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Mewujudkan pelayanan public di Desa yang berkualitas	Indeks Desa Membangun	Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja desa	Persentase Fasilitasi Evaluasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Sinergi perencanaan pembangunan desa dan Kabupaten		Terintegrasi ya perencanaan pembangunan desa dengan pemerintah daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan desa dengan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Manonjaya Tahun 2025 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Manonjaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Manonjaya	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Manonjaya	61	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Manonjaya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manonjaya	82,5	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100 %	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

III. RENCANA KINERJA KECAMATAN MANONJAYA TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MURNI KECAMATAN MANONJAYA TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	% ANGGARAN
BELANJA			2.397.007.472	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.032.272.472	84,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.801.598.801	75,16
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.801.598.801	75,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		72.202.671	3,01
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.863.671	1,37
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	0,21
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.100.000	0,38
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.239.000	1,05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.500.000	2,82
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000	0,65
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.000.000	2,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90.971.000	3,80
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.993.000	3,13

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.978.000	0,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.740.000	2,62
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		24.930.000	1,04
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.930.000	1,04
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		15.000.000	0,63
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		22.810.000	0,95
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.810.000	0,95
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			224.675.000	9,37
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		224.675.000	9,37
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	224.675.000	9,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45.000.000	1,88
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		45.000.000	1,88

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	45.000.000	1,88
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			32.320.000	1,35
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32.320.000	1,35
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.170.000	0,63
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.150.000	0,72

Tabel. 2.5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN MANONJAYA TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH	% ANGGARAN
BELANJA			2.408.237.972	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.045.152.972	84,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.751.598.801	75,16
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.751.598.801	75,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		85.083.171	3,01
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.540.671	1,37
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.892.500	0,21
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.100.000	0,38
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.550.000	1,05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.500.000	2,82
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000	0,65
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.000.000	2,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		140.971.000	3,80

	Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.993.000	3,13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.978.000	0,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.740.000	2,62
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		24.930.000	1,04
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.930.000	1,04
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		15.000.000	0,63
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		42.810.000	0,95
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.810.000	0,95
			224.725.000	9,37
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		224.725.000	9,37
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	224.725.000	9,37
			25.000.000	1,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN			25.000.000	1,88

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		25.000.000	1,88
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	1,88
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30.620.000	1,35
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		30.620.000	1,35
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.470.000	0,63
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.150.000	0,72

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Manonjaya adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Manonjaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Manonjaya tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Manonjaya	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Manonjaya	61	63,9	104,75 %	Sangat Tinggi
2.	S.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Manonjaya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manonjaya	82,5	85,04	103,08%	Sangat Tinggi
3.	S.3. Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukan sebanyak 3 (tiga) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

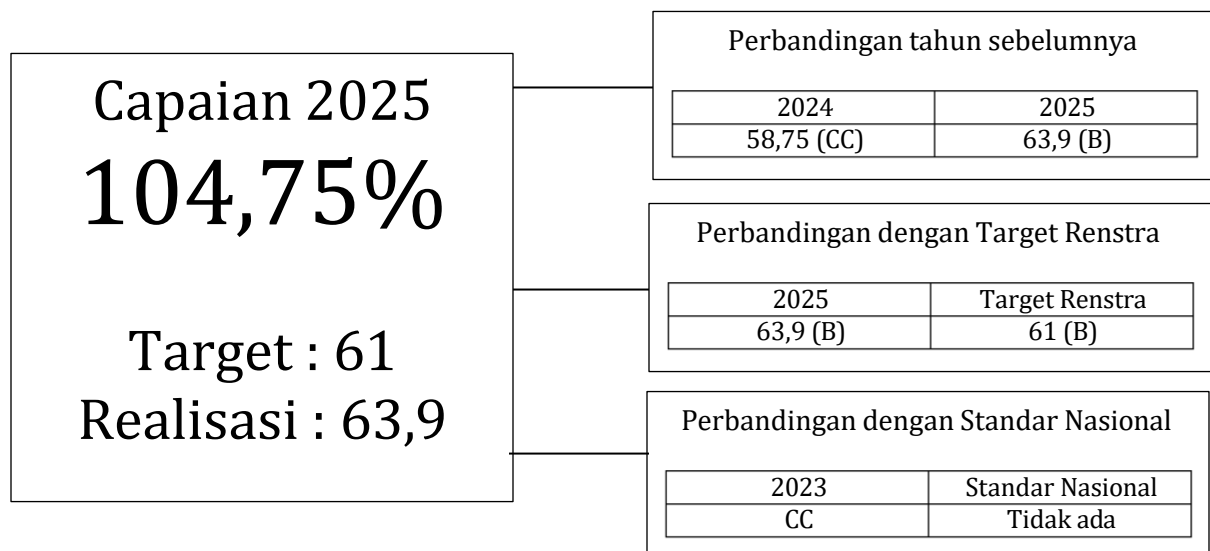
Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kecamatan Manonjaya

Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Kecamatan
Manonjaya

Tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai tujuan ini, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Manonjaya.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2025 belum dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dimana evaluasi atas implementasi SAKIP saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP.

Akan tetapi apabila dilihat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 63,9 poin atau kategori B dengan capaian 104,75 %. Sedangkan untuk tahun 2023, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 58,75 poin atau kategori CC (CUKUP), hal ini menunjukkan bahwa nilai AKIP tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.



Baiknya nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan meningkatnya penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

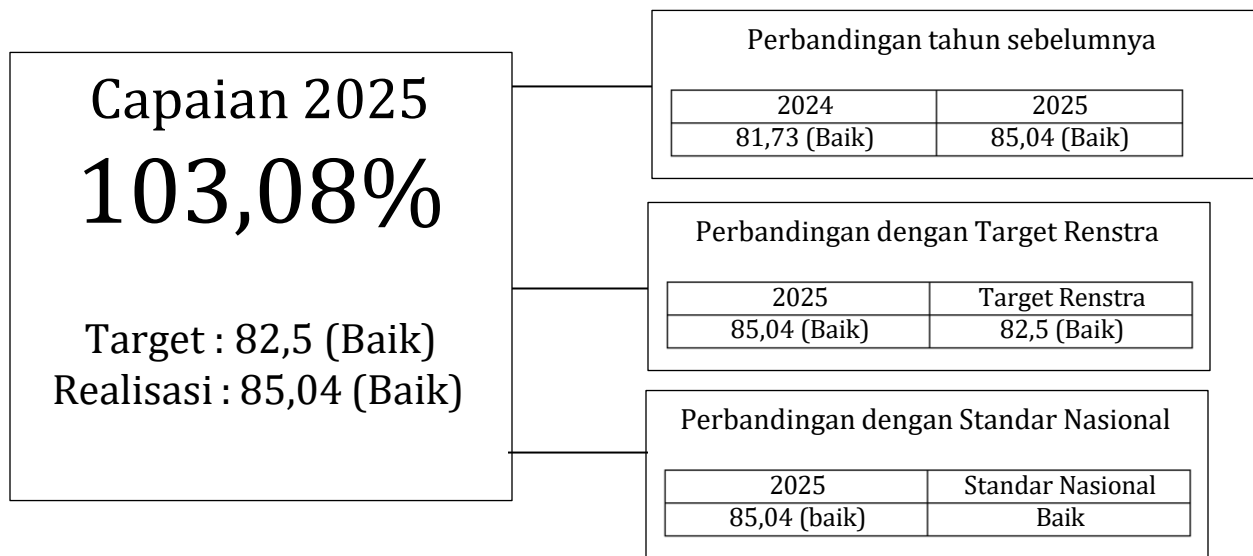
- a. Melakukan reviu program dan kegiatan pada Renja dan RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
- b. Melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Manonjaya.
- c. Melakukan integrasi e-sakip dan e-kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat kabupaten Tasikmalaya bahwa pada tahun 2024 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah baik, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Manonjaya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manonjaya
---	---

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

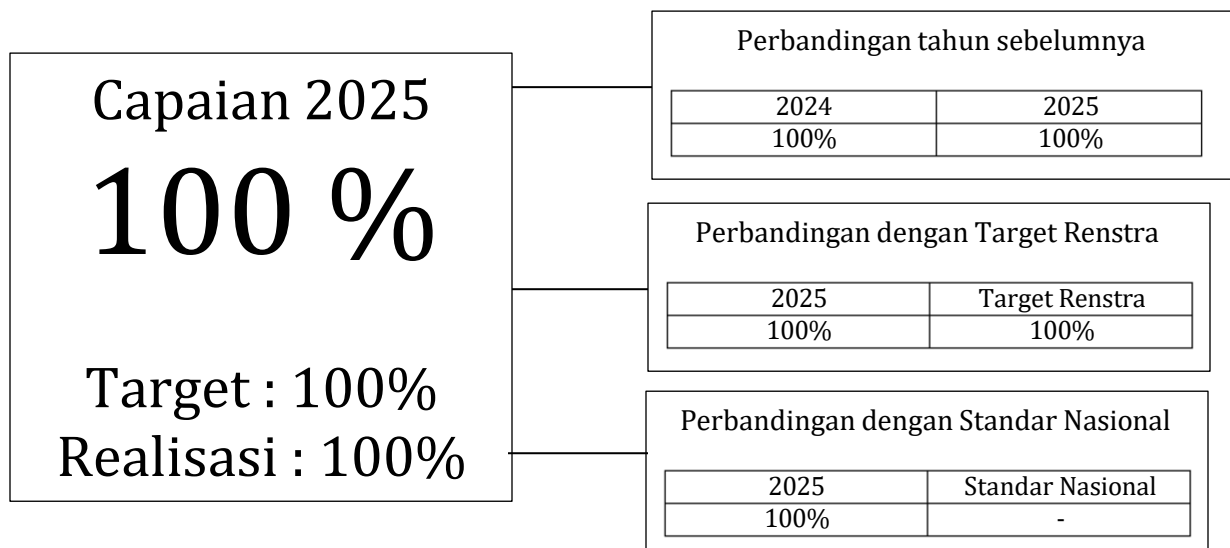
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manonjaya tahun 2025 yaitu 85,04 poin kategori baik (B) dari target 82,5 poin dengan capaian kinerja 103,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 81,73 poin dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 2,54. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari tahun 2023 hingga 2025.



Keberhasilan pencapaian target untuk sasaran ini didukung oleh peran seluruh pegawai dalam memberi pelayanan yang optimal dan sesuai ketentuan.

Sasaran 3 Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
--	---

Kecamatan Manonjaya telah berhasil mencapai target integrasi perencanaan pembangunan desa dengan pemerintah daerah. Perencanaan Pembangunan Desa telah terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.



Perencanaan pembangunan desa telah terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif dan efisien. Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah juga meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan desa sehingga Kualitas pembangunan desa meningkat, dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan capaian indikator ini karena telah dilaksanakannya :

1. Penguatan Koordinasi: Penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan Kapasitas: Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
3. Pengembangan Teknologi: Pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan desa.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Manonjaya tahun 2025 dan perjanjian kinerja yang ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Manonjaya secara garis besar telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi sebagaimana diuraikan dalam BAB III laporan ini di antaranya :

1. Indikator kinerja berupa Nilai AKIP pada tahun 2025 ditargetkan 61 ternyata realisasinya melebihi target yaitu 63,9 atau memperoleh kenaikan sebesar 104,75 % dengan kategori capaian sangat tinggi.
2. Indikator kinerja berupa Nilai Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan 82,5 ternyata realisasinya melebihi target yaitu 85,04 poin atau memperoleh kenaikan sebesar 103,08% dengan katagori capaian sangat tinggi
3. Indikator kinerja berupa Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori capaian sangat tinggi.

Keberhasilan dalam capaian tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kualitas dan Kompetensi SDM yang semakin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kecamatan Manonjaya memang menjadi salah satu kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus dengan mengikuti berbagai diklat maka Kecamatan Manonjaya berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga dapat dicarikan jalan keluar. Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA Kecamatan Manonjaya kemudian lebih di detailkan lagi ke dalam bentuk target bulanan sehingga lebih mempermudah lagi dalam operasionalisasinya.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyusun Gender Analysis Pathway/gender Budget Statement 9GAP/GBS) dan melakukan analisis resiko dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setia PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

3. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Manonjaya mulai dari tingkat terendah (RT, RW, Kedusunan dan Desa) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

4. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui musrenbang, dimana musrenbang tingkat kecamatan di format secara horizontal dengan membentuk beberapa klaster sehingga dengan sistem klasterisasi ini diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

5. Sinergitas antar lembaga dalam forkompimcam

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Kepala Seksi Trantibum (sebagai koordinator), Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala KUA dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koodinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

II. REALISASI ANGGARAN

Untuk melihat realisasi penyerapan anggaran di Kecamatan Manonjaya pada tahun 2025, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2
AKUNTABILITAS KEUANGAN

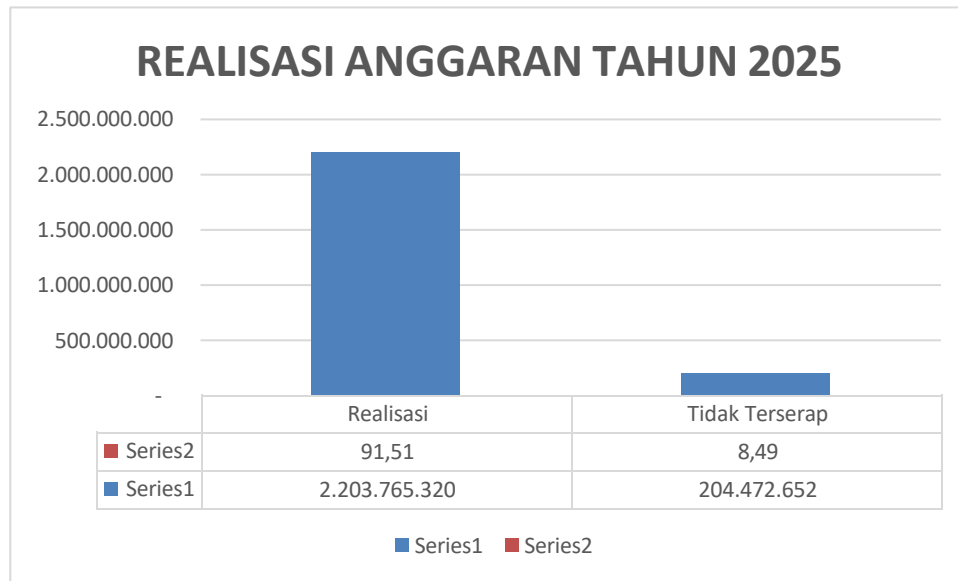
No	Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	%	Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	104,75%	2.045.152.972	1.845.170.120	199.982.852	90,22	9,78
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100,61%	82.740.000,00	78.884.000	3.856.000	95,34	4,66
3	Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah	100%	280.345.000,00	279.711.200,00	633.800	95,34	4,66
Jumlah			2.408.237.972	2.203.765.320	204.472.652	95,34	4,66

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan lebih dari 100% serta terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran, semua sasaran capaian kinerjanya sudah mencapai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,66 % atau senilai Rp. 204.472.652 yang rinciannya sebagai berikut

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan” tercapai melalui kinerja “Nilai AKIP” sebesar 104,75% dan efisiensi anggaran sebesar 9,78%
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya profesionalitas penyelenggara pemerintah kecamatan” tercapai melalui kinerja “Nilai IKM” sebesar 100,61% dan efisiensi anggaran sebesar 4,66 %
3. Kinerja Sasaran “Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pemerintah Daerah” tercapai melalui kinerja “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa” sebesar 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 4,66 %

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.



b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori sangat tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

1. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti website, facebook dan instagram menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai layanan dan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Manonjaya.

2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Formasi pegawai Kecamatan Manonjaya berdasarkan analisis jabatan yang seharusnya 21 pegawai saat ini hanya ada 57,14% yaitu 12 orang pegawai, tentu saja ini belum memadai bagi organisasi Kecamatan Manonjaya yang memiliki wilayah desa sebanyak 12 desa, hal ini menjadi tugas dan beban yang berat dengan adanya pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks dengan adanya alokasi dana desa serta perubahan dalam mekanisme anggaran.

2.2 Kegiatan yang bersifat penjagaan

Beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang) pada beberapa obyek sulit diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telpon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

LKIP Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber Daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran rencana strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Manonjaya Tahun 2025. Kecamatan Manonjaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan hasil baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dari IKU yang ditetapkan, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp 2.408.237.972,00 Dengan efisiensi sebesar 4,66% atau senilai Rp. 2.203.765.320,00.

Pemerintah Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan.